



Kajian Literatur: Prinsip-Prinsip Etika Politik dalam Islam

Literature Review: Principles of Political Ethics in Islam

Gladys Putri Ferica¹, Fadhiah As Shifah Parinduri², Santri Minarta³,
Muhammad Rifai Harahap⁴

Program Studi Pendidikan Fisika, Pendidikan Islam, Universitas Negeri Medan

E-mail: shifa93628@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 01-04-2026

Revised : 03-04-2026

Accepted : 05-04-2026

Published : 07-04-2026

Abstract

Political ethics in Islam constitute a moral foundation that regulates the behavior of individuals and leaders in exercising power. This study aims to examine the principles of political ethics in Islam and their relevance in the context of modern politics. The method used is a literature study by analyzing various relevant scientific. The results show that Islamic political ethics are based on the principles of justice ('adl), trustworthiness (amanah), honesty (sidq), and deliberation (shūrā). These principles play an important role in creating good governance and integrity in political systems. Furthermore, Islamic political ethics are highly relevant in addressing contemporary political issues such as corruption, abuse of power, and public distrust. Therefore, the implementation of Islamic ethical values is essential in establishing a just, transparent, and welfare-oriented political system.

Keywords: *Political ethics, Islam, justice*

Abstrak

Etika politik dalam Islam merupakan landasan moral yang mengatur perilaku individu maupun pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika politik dalam Islam serta relevansinya dalam konteks politik modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika politik Islam berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl), amanah, kejujuran (sidq), dan musyawarah (shūrā). Prinsip-prinsip tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Selain itu, etika politik Islam juga relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan politik kontemporer, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai etika politik Islam menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem politik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Etika politik, Islam, keadilan

PENDAHULUAN

Politik adalah fenomena yang berkaitan dengan manusia dan selalu ada dalam konteks komunitas atau kelompok. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Manusia adalah inti utama politik watak atau kepribadian seseorang yang menjadi patokan utama analisa politik.

Oleh karena itu, politik dan etika menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik yang didasarkan pada struktur sosial saat ini dan berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang perilaku yang baik dan mendorong mereka untuk menghindari perilaku buruk. Etika mengatur dan mengarahkan citra moralitas masyarakat tinggi dan mengarahkan tingkah laku manusia. Etika menuntut masyarakat untuk bertindak rasional terhadap semua norma.



Etika politik Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti: Pengangkatan pemimpin, etika dalam menghadapi pemberontak, pilihan bentuk dan sistem pemerintahan, sikap sebagai politisi, dan masalah lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal inilah yang membedakan etika politik Islam dengan etika politik biasa. Etika politik Islam selalu berpedoman pada wahyu Ilahi berupa Al-Qur'an dan hadis, sehingga ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan politik, ia langsung dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (Ernawati dkk., 2024).

Saat ini, di era globalisasi yang paling relevan dalam dunia politik adalah ketika etika politik seakan terlupakan bahkan cenderung menghilang, mengingat tantangan dan dinamika politik yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Realitas yang ada menunjukkan bahwa etika politik dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk kepentingan sepihak, padahal etika politik berkaitan erat dengan nilai dan norma dalam masyarakat, serta menuntut dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip moral dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut sebetulnya telah diatur dalam asas negara kita, yaitu Pancasila namun, seiring berjalannya waktu asas-asas yang ada terlupakan dan itu seharusnya menjadi kekhawatiran kita bersama (Hopipah & Rosul, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika politik dalam Islam melalui pendekatan studi literatur. Fokus kajian meliputi konsep dasar etika politik dalam Islam, nilai-nilai utama yang mendasarinya, serta relevansinya dalam praktik politik kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian politik Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan etika politik dalam Islam.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu proses menganalisis informasi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan hubungan antar gagasan yang berkaitan dengan etika politik Islam. Diharapkan pendekatan ini akan memberikan wawasan tentang etika politik yang akurat dari perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Etika

Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna watak, kesusilaan, atau adat. Menurut pendapat Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang memaparkan makna baik dan buruk, menyampaikan apa yang sepatasnya dilakukan oleh manusia, menerangkan apa yang menjadi tujuan hidup yang mestinya dicapai dalam perbuatan sehari-hari, serta memperlihatkan perbuatan apa yang harusnya dilakukan sebagai manusia. Etika ialah sebuah sistem, prinsip moral, atau aturan berprilaku. Dalam bahasa Inggris etika berarti pantas, layak, tata susila, beradab. Etika sangat berkaitan dengan aspek moral, yang titik tekannya juga pada penilaian baik dan buruk sehingga ia bisa dinilai sebagai manusia. Etika mampu membawa seseorang untuk bersikap rasional dan kritis, karena etika berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (Adnan & Usman, 2022).



Konsep Etika Politik dalam Islam

Etika dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Ada dua alasan pentingnya etika dalam Islam. Pertama politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya dalam berpolitik harus diniatkan Lillahi Ta'ala. Kedua, etika politik dianggap sangat perlu dalam Islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, menghargai, saling menghargai hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik (Dahlan, 2021).

Etika politik dalam Islam tidak hanya mencakup aspek duniawi yang berhubungan dengan interaksi antara manusia satu sama lain dan dengan lingkungan, tetapi juga aspek ukhrawi yang berhubungan dengan manusia dengan Allah SWT. Etika politik Islam selalu dipandu oleh wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga setiap pemimpin yang membuat keputusan politik akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Dalam pandangan ini, politik dianggap sebagai amanah yang besar yang harus dijalankan dengan kesadaran moral yang tinggi (Ernawati, Bahar, & Kurniati, 2024).

Prinsip-Prinsip Etika Politik dalam Islam

1. Amanah

Kata amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman yang bermakna keamanan atau ketentraman. Dalam kamus bahasa telah disebutkan artinya sebagai lawan dari khawatir atau takut. Dari akar kata itu mempunyai banyak makna, meskipun punya banyak makna namun, pada akhirnya semua terpusat pada makna “tidak mengkhawatirkan, aman, serta tenteram.” Jika ada sesuatu baik itu berupa barang atau jabatan yang dititipkan kepada seseorang, itulah yang disebut amanah, karena barang atau jabatan yang dipegang oleh orang tadi tidak membuat si pemberi amanah khawatir terhadap sesuatu yang dititipkan. Bahkan ia merasa tenang serta yakin bahwa barangnya akan dipelihara dengan baik, dan jika seandainya pemiliknya meminta kembali barang tersebut si penerima dengan senang hati akan mengembalikannya. Ini berarti seseorang yang mempunyai karakter senantiasa menentramkan hati karena terpercaya disebut *amin*.

2. Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘adl yang bermakna sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan, misalnya keseimbangan antara hak dan tuntutan serta persamaan dalam segala bentuk pelayanan kepada makhluk. Hakikat dari pada keadilan ialah memperlakukan semua orang sesuai hak dan kewajiban yang mereka butuhkan. Dalam kaitannya dengan etika politik keadilan sangatlah diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya “Etika Politik”, keadilan adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperlakukan setara tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni, keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, kejujuran, dan amanah. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58, dikemukakan bahwa dua aspek prinsip dasar etika politik yaitu amanah dan keadilan. Umat Islam perlu berpegang pada dua prinsip



ini, agar mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, serta menerapkan keadilan bagi semua pihak. Menjaga Amanah sebagai bentuk kejujuran dalam menjalankan tugas dan Berlaku Adil untuk mewujudkan kesetaraan semua pihak di hadapan hukum adalah mutlak (Adnan & Usman, 2022).

Sejarah etika politik dalam Islam mengajarkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah dan persamaan adalah fondasi utama dalam politik Islam. Prinsip-prinsip tersebut menuntut kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparan, dan inklusif. Prinsip shura (musyawarah) memastikan adanya partisipasi publik, sementara 'adl (keadilan) menjamin hak setiap warga negara terpenuhi tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis untuk mengelola kekuasaan demi kemaslahatan bersama (Astriani, Shafar, & Kurniati, 2024).

Etika Politik dalam Perspektif Tokoh Islam (Al-Mawardi)

Konsep politik Al-Mawardi menekankan bahwa kepemimpinan (imamah) adalah instrumen untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi menawarkan konsep normatif dalam etika politik yang mencakup tanggung jawab pemimpin dan kriteria kepemimpinan yang adil. Melalui karyanya seperti *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia merumuskan syarat-syarat bagi imam/pemimpin dan mekanisme kontrol sosial melalui lembaga *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Pemikirannya tetap menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi relevansi dan aplikasi praktis etika politik dalam dinamika politik kontemporer (Sakhi, Amin, & Kurniati, 2024).

Nasiruddin Tusi dari peradaban Islam menciptakan sistem etika politik yang mengintegrasikan moralitas individu dengan struktur pemerintahan yang adil. Sistem ini didasarkan pada filsafat klasik dan nilai-nilai Islam. Untuk menciptakan tata kelola yang stabil, Tusi memadukan elemen teologis dan empiris dalam kerangka sosial-politik. Perbandingan antara tokoh-tokoh klasik ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan metode, moralitas tetap menjadi fondasi utama dalam praktik politik islam sepanjang sejarah (Hopipah & Rosul, 2025).

Relevansi Etika Politik Islam dalam Konteks Kontemporer

Tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, seperti konflik dan korupsi, memerlukan pendekatan holistik berbasis nilai-nilai kuat. Etika politik Islam memberikan kerangka kerja moral yang kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kontribusi etika politik Islam dalam penyelesaian konflik dan pembatasan korupsi di negara-negara Muslim kontemporer menjadi sangat krusial di tengah krisis integritas global (Putra, Zahir, Razak, & Kurniati, 2024).

Masalah etika politik yang sering muncul, seperti pelanggaran kode etik selama pemilihan umum, menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam untuk mencapai tata kelola yang lebih baik yang bebas dari konflik internal. Pengabaian terhadap etika seringkali berujung pada politik identitas yang memecah belah dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Dengan mengedepankan nilai-nilai transendental, politik dapat dikembalikan fungsinya sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang beradab (Setyawan, Azizal, Rain, & Kurniati, 2024).



Implementasi Etika Politik Islam di Indonesia

Sebuah pemerintahan akan berjalan efektif, jika dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Dalam konteks ke-Indonesia-an, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Dengan harapan, pemilihan umum tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau dirinya sendiri. Pemikiran para pemikir muslim terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan renungan, acuan, dan evaluasi terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia agar menjadi lebih santun dan membawa kemaslahatan (In'amuzzahidin, 2015).

Integrasi nilai-nilai politik Islam seperti shura (musyawarah), 'adl (keadilan), dan amanah ke dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia menunjukkan adanya harmoni antara nilai agama dan prinsip demokrasi. Tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai tersebut memerlukan penerapan nyata dalam kebijakan publik dan perilaku para aktor politik. Implementasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat integritas sistem politik, tetapi juga untuk menjaga kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif (Nurmayani dkk., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etika politik dalam Islam merupakan fondasi penting dalam menjalankan praktik politik yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan keadilan. Etika politik Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan ('adl), amanah, kejujuran (ṣidq), dan musyawarah (shūrā) menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem politik yang berintegritas.

Selain itu, etika politik Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan politik modern, seperti korupsi, konflik kepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan nilai-nilai etika tersebut dapat menjadi solusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi etika politik Islam dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam konteks politik yang cenderung pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menginternalisasikan nilai-nilai etika tersebut dalam kehidupan politik untuk menerapkan etika politik Islam dalam praktik, terutama dalam konteks politik yang cenderung pragmatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Usman, M. I. (2022). Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Nisa/4:58). Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis dan Pemikiran Islam, 4(2), 77–95.
- Astriani, Shafar, A. G., & Kurniati. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2). <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1).
- Ernawati, Bahar, S., & Kurniati. (2024). Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 264–275. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.559>



- Hopipah, & Rosul, M. (2025). Etika Politik Dalam Tradisi Islam Dan Barat: Perbandingan Konseptual Antara Nasiruddin Tusi Dan Immanuel Kant. *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 1(1), 103–115. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun>
- In'amuzzahidin, M. (2015). Etika Politik dalam Islam. *Wahana Akademika*, 2(2), 89–104.
- Nurmayani, Parinduri, A. Z., Aulia, S., Salsabila, & Prastiwi, N. A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Politik Islam dalam Demokrasi Pancasila. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Putra, A. D., Zahir, R., Razak, S. A., & Kurniati. (2024). Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 3(2), 583–592. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.583>
- Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati. (2024). Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 95–106.
- Setyawan, M. A., Azizal, M. S., Rain, T. J. F., & Kurniati. (2024). Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer. *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 56–64. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554>